

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS

DANI MELMAMBESSY

Dosen Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay

*Abstract: Jayapura City Government Financial Performance Analysis in terms of Regional Independence Ratio, Regional Dependence, Fiscal Decentralization and Effectiveness. The purpose of the study was to determine the regional financial performance of the Jayapura City government measured from the ratio of regional independence, regional dependency ratio, fiscal decentralization ratio, and effectiveness ratio. The results showed that the ratio of regional financial independence in Jayapura City during 2017 to 2019 averaged 23.14%. The dependency ratio shows that during 2017 to 2019 the average number is very high, namely 83.10%, meaning that the Jayapura City government has a very high dependence on funds received from the Central Government and Provincial Government. The fiscal decentralization ratio of the regional government of Jayapura City from 2017 to 2019 shows an average degree of decentralization of 16.82% which is included in the less category. This means that the regional government of Jayapura City has not been fully independent in implementing decentralization by optimizing regional potential (PAD) to provide good public services. The ratio of the effectiveness of regional original income from 2017 to 2019 on average shows a very high number, which is 103.35%, which is included in the very effective category. This proves that the local government of Jayapura City is very effective in realizing the planned local revenue (PAD) compared to the target set based on the real potential of the area.*

*Keywords: Regional Independence Ratio, Regional Dependence, Fiscal Decentralization, Effectiveness.*

**Abstrak:** Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura diukur dari rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sedang yaitu 23,14%. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 83,10% artinya bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Jayapura tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan derajat desentralisasi sebesar 16,82% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Jayapura belum sepenuhnya bisa mandiri menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang baik. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 103,35% termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura sangat efektif dalam merealisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

**Kata Kunci :** *Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas.*

### LATAR BELAKANG

Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri agar pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap daerah sangat memahami kebutuhan masing-masing daerahnya agar dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem

sentralisasi fiskal dimana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah.

Melalui otonomi daerah ini diharapkan akan menciptakan kemandirian daerah, sehingga mempercepat dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, serta terciptanya keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang dapat dipakai dalam menghimpun dana dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182)

Kota Jayapura sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Papua yang merasakan langsung kekhususan dalam pengelolaan bidang pemerintahan dan bidang fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Daerah (OTDA) dan Otonomi Khusus (OTSUS) di Papua (UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua). Implementasi Pelaksanaan OTDA dan OTSUS mengharuskan pemerintah daerah Kota Jayapura untuk menentukan prioritas program dan perencanaan pembangunan daerah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya serta mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Luigi Laurens Derosario Berwulo dkk (2017) dalam penelitian dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura menunjukkan bahwa angka

kemandirian tertinggi masih berada pada angka 18 %, ini menunjukkan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya namun hal ini belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Selanjutnya Rusli (2018) dalam penelitiannya tentang kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal Kota Jayapura terus meningkat namun peningkatan tersebut hanya berkisar diantara 1-10% sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Jayapura masih cukup tinggi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kota Jayapura terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi walaupun paket otonomi daerah telah diberikan. Pada sisi belanja daerah daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun guna pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan daerah.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura, diukur dari rasio kemandirian daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura, diukur dari rasio ketergantungan daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura, diukur dari rasio desentralisasi fiskal?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Jayapura, diukur dari rasio efektifitas.

#### **KINERJA KEUANGAN DAERAH**

Kinerja (*Performance*) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.”

Hadirnya otonomi daerah yang dimulai dengan hadirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentunya membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Sebelum era otonomi daerah, hampir sebagian pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se – Indonesia memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pemerintahan Pusat. Menurut Mardiasmo (2002:30) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik disbanding dengan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Kehadiran undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi Pembiayaan.

Menurut Widodo dalam Halim (2002:126) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapata yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pandapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengadung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

**b. Rasio ketergantungan keuangan Daerah**

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD degan total

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

**c. Rasio Desentralisasi Fiskal**

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat sesentrasisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

**d. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

**Analisis Kinerja Keuangan Kota Jayapura**

**1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembenagunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut ini adalah rumus tingkat kemandirian keuangan daerah:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian
2017	173.932.748.009	754.512.575.712	23,05%
2018	195.734.780.996	892.475.074.572	21,93%
2019	210.002.868.714	859.233.591.175	24,44%
Rata-rata			23,14%

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura pada tahun 2017 sampai 2019 berada pada kriteria sedang yaitu tahun 2017 diperoleh sebesar 23,05%, tahun 2018 diperoleh sebesar 21,93% dan tahun 2019 diperoleh sebesar 24,44%. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Jayapura dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah adalah sedang.

Rasio Ketergantungan Daerah Kota Jayapura

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2017	869.859.694.085	1.068.022.271.558	81,45%
2018	994.031.479.466	1.189.766.260.462	83,55%
2019	998.810.539.012	1.184.583.578.262	84,32%
Rata-rata			83,10%

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan atas dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jayapura dapat dikategorikan sangat tinggi, yaitu pada tahun 2017 diperoleh sebesar 81,45%, kemudian pada tahun 2018 diperoleh sebesar 83,55%, dan tahun 2019 diperoleh sebesar 84,32%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
2017	173.932.748.009	1.068.022.271.558	16,29%
2018	195.734.780.996	1.189.766.260.462	16,45%
2019	210.002.868.714	1.184.583.578.262	17,73%
Rata-rata			16,82%

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jayapura pada tahun 2017 sampai 2019 berada pada kriteria kurang yaitu diperoleh tahun 2017 diperoleh sebesar 16,29%, kemudian tahun 2018 diperoleh sebesar 16,45% dan tahun 2019 diperoleh sebesar 17,73%. Hasil rasio derajat desentralisasi Kota Jayapura rata-rata 16,82% ini menandakan bahwa tingkat penilaian desentralisasi fiskal dikategorikan kurang, sehingga Kota Jayapura belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan menurut Mahmudi (2010:142) sebagai berikut:

## 3) Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat disentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat disentralisasi fiskal dalam penelitian ini dikur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut ini adalah formula untuk mengukur tingkat disentralisasi fiskal:

anggaran setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Kota Jayapura masih perlu adanya DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Pemerintah Provinsi.

## 4) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektifitas Kota Jayapura

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektifitas
2017	173.932.748.009	170.247.695.314	102,16%
2018	195.734.780.996	189.759.986.678	103,15%
2019	210.002.868.714	200.500.000.000	104,74%
Rata-rata			103,35%

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pendapatan asli daerah Kota Jayapura pada tahun 2017 sampai 2019 sangat efektif, karena nilai yang diperoleh adalah berada di atas 100% yaitu tahun 2017 diperoleh sebesar 102,16%, kemudian tahun 2018 diperoleh sebesar 103,15%, dan pada tahun 2019 diperoleh sebesar 104,74%.

### KESIMPULAN

1. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sedang yaitu 23,14%. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat Kota Jayapura dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah adalah sedang, sehingga membuat Pemerintah Daerah Kota Jayapura masih tergantung kepada sumber lain (pihak ektern).
2. Hasil perhitungan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 83,10% artinya bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Jayapura tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan derajat desentralisasi sebesar 16,82% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Jayapura belum sepenuhnya bisa mandiri menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang baik. Oleh karena itu, Kota Jayapura masih perlu adanya DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Pemerintah Provinsi.
4. Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 103,35% termasuk dalam kategori sangat

efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura sangat efektif dalam merealisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL - UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*
- Bambang Riyanto. 2005, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : YBPFE UGM
- Bastian, Indra. 2004. *Akuntansi Sektor Publiksuatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- 2005, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. *Jurnal Manajemen Usahawan*. Hal 42. Nomor 06 Th XXXV Juni 2006. Lembaga Management FE-UI. Jakarta.
- Husein, Umar, 2003, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lazira KS. 2016, *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi FE-Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.

- Luigi Laurens Derosario Berwulo dkk, 2017, *Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- 2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi
- Nurkholis, 2006, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta : Grasindo.
- Rindang Arumdari, 2019. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. Skripsi FEB-Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan.
- Rusli, 2018, *Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura*, Skripsi STIE Port Numbay, Jayapura.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit, Galia Indonesia, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua
- UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah